



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



LAPORAN AKHIR PENELITIAN KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR



INSTAGRAM

@humasunanda



WEBSITE

<http://lppm.unanda.ac.id>

ALAMAT

Jl. Puang H. Daud No. 4, Kota Palopo,

Sulawesi Selatan, INA. 91921

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada
Masyarakat (LPPM) Universitas Andi Djemma

Email : lp2m@unanda.ac.id

KERJASAMA

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNANDA
DENGAN BAPPELITBANGDA LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Berkah, Rahmat, Karunia dan RidhoNya, tim peneliti dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian yang berjudul: **“KAJIAN RISET KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR”**

Laporan Hasil Penelitian ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas kegiatan penelitian yang dilakukan oleh TimPeneliti pada LPPM di Universitas Andi Djemma.

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pelaksanaan MoU antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Universitas Andi Djemma dalam Bidang Penelitian yang telah dituangkan dalam perjanjian Kerjasama antara BAPPELITBANGDA dengan LPPM UNANDA Tahun anggaran 2022.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Luwu Timur yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan kepada peneliti untuk melakukan penelitian tentang “KAJIAN RISET KEMISKINAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR”
2. Yth. Bapak Kepala BAPPELITBANGDA Luwu Timur atas kepercayaan kerjasama sebagai Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan Pengembangan.
3. Yth. Bapak Dewan Kelitbangan dan Tim Pengendali Mutu Luwu Timur atas dukungan serta Kerjasama dalam penelitian ini.
4. Yth. Bapak Kepala Dinas Sosial Luwu Timur beserta unsurnya

yang telah memberikan dukungan berupa data-data untuk keperluan penelitian ini.

5. Yth. Bapak Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPELITBANGDA Luwu Timur beserta staff serta unsurnya yang telah memberikan dukungan administrasi dalam penelitian ini.

Akhirnya, peneliti mengharapkan agar Laporan Hasil Penelitian ini dapat memenuhi fungsinya sebagai khasanah ilmu pengetahuan. Peneliti menyadari pula bahwa Laporan Hasil Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pembaca sangat diharapkan, guna perbaikan dan penyempurnaan Laporan Hasil Penelitian ini. Peneliti tak lupa menyampaikan permohonan maaf jika dalam penulisan Laporan Hasil Penelitian ini terdapat kekeliruan dan kekurangan.

Demikian, dan terima kasih.

Palopo, November 2022

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Rumusan Masalah.....	5
1.4. Tujuan dan Sasaran	5
1.6. Metodologi	7
1.7. Luaran	20
BAB 2. GAMBARAN UMUM DAERAH	21
2.1. Keadaan Geografis	21
2.2. Kependudukan	22
2.3. PDRB.....	23
2.4. Ketenagakerjaan	25
2.5. Indeks Pembangunan Manusia.....	25
2.6. Pengeluaran Penduduk (Pengeluaran Perkapita)	26
BAB 3. PROFIL KEMISKINAN	28
3.1. Kondisi Kemiskinan (Exisisting)	28
3.2. Indikator Kemiskinan.....	30
3.3. Penyebab Kemiskinan	32
a. Analisis aktifitas masyarakat.	32
b. Analisis manajemen keuangan masyarakat.....	34
c. Analisis sumber penghidupan	37
d. Analisis Kelembagaan	40

3.4. Karakteristik Kemiskinan.....	42
3.5. Permasalahan Kemiskinan.....	44
3.6. Manajemen Pendataan.....	44
BAB 4. PRIORITAS PROGRAM	47
BAB 5. PENUTUP	51
5.1. Kesimpulan	51
5.2. Rekomendasi	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN	55

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tingginya angka kemiskinan dan rentannya penduduk miskin terhadap gejolak makro-ekonomi, telah menempatkan masalah kemiskinan sebagai isu nasional. Berdasarkan data BPS Januari 2022 (Gambar 1), jumlah penduduk miskin saat ini mencapai 9,71 persen dari total penduduk atau sekitar 26,50 juta jiwa dan mengalami penurunan 0,36 persen terhadap maret 2021 (BPS, 2022). Beberapa lembaga internasional bahkan memiliki angka yang jauh lebih tinggi. Bank Dunia misalnya, memperkirakan jumlah penduduk miskin Indonesia dengan menggunakan garis kemiskinan internasional USD2 per hari per orang mencapai 49,5 persen atau sekitar 108 juta jiwa. Dengan kata lain, setiap dua orang penduduk, satu diantaranya terkategori sebagai orang miskin. Sebuah angka yang tentu saja sangat mengkhawatirkan.



Gambar 1. Statistik Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan merupakan masalah global yang menggambarkan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, sebagian memahami secara subyektif dan komparatif, dari segi moral dan evaluatif, dan sementara lainnya memahami dari sudut ilmiah yang telah mapan. Pemahaman kemiskinan terutama menggambarkan kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam hal ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan kurangnya pelayanan dasar, serta kebutuhan sosial. Gambaran kemiskinan lainnya adalah keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial memberikan makna bahwa kemiskinan juga mencakup masalah-masalah politik dan moral, yang tidak dibatasi pada bidang ekonomi.

Sejak 1994, pemerintah semakin intensif mengorganisasikan sejumlah kebijakan guna melengkapi kebijakan-kebijakan sebelumnya, antara lain program Inpres Desa Tertinggal (IDT), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Pembinaan Peningkatan Pendapatan Petani-Nelayan Kecil (P4K), Kredit Usaha untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (KUKESRA) dan Tabungan untuk Peningkatan Kesejahteraan Keluarga (TAKESRA), Pemberian Makanan Tambahan untuk Anak Sekolah (PMTAS), Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Program Pembangunan Kecamatan (PPK), dan

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), termasuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) selama krisis ekonomi.

Luwu Timur merupakan kabupaten dengan karakter wilayah yang memiliki sebaran kemiskinan yang beragam karena dipengaruhi kondisi wilayah. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Luwu Timur tahun 2020 tercatat sebesar 20,82 ribu jiwa atau 6,85 % dari jumlah penduduk (BPS, 2020) dan tahun 2021 sebesar 20,99 ribu jiwa atau 6,94 % dari jumlah penduduk (BPS, 2021). Data tersebut belum diketahui secara spesifik berdasarkan zona lingkungan yang didiaminya, masih parsial serta indikator kemiskinan berdasarkan persepsi yang belum tentu berlaku dimasyarakat.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan baik dalam skala nasional, regional maupun wilayah. Masalah kemiskinan bukan hanya merupakan masalah ekonomi semata, akan tetapi juga merupakan masalah sosial dan kemanusiaan. Oleh karena itu, implikasi permasalahan kemiskinan dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia secara keseluruhan, yang pada akhirnya menentukan kelangsungan pembangunan kualitas manusia itu sendiri yang meliputi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Dalam kaitan proses perkembangan dinamika kehidupan masyarakat, masalah kemiskinan dipandang sebagai masalah yang sangat dinamis, sehingga membutuhkan peran institusi, program serta metode pendekatan yang mampu menjawab permasalahan kemiskinan, yang bertumpu pada beberapa nilai dasar filosofi yaitu ***rasa, karsa, dan cipta*** sebagai kata kunci dalam pelaksanaan pemberdayaan sosial (Redmod & Johnson, 1992; Sumodiningrat, 2008).

Program kebijakan pengentasan kemiskinan hendaknya tidak terlepas dari nilai-nilai dasar filosofinya, antara lain rasa yang berarti menyadari bahwa setiap individu memiliki harkat dan martabat diri, karsa memiliki arti kemauan dan kemampuan untuk berkreasi menciptakan sesuatu untuk meningkatkan taraf hidup dan berkembang lebih maju (Johnson, 1992; Sumodiningrat, 2008). Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang perlu mendapatkan perhatian secara terus menerus karena membiarkan kemiskinan sama saja dengan menggadaikan nilai-nilai martabat bangsa, dimana masyarakat yang miskin akan menjadi titik lemah dalam pelaksanaan pembangunan.

Permasalahan kemiskinan bukanlah suatu gejala baru bagi masyarakat Indonesia. Selama puluhan tahun, kondisi kemiskinan itu selalu nyata di tengah-tengah masyarakat baik di kota, di desa, daerah pegunungan, dan pesisir.

1.2. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- 2) Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235).
- 3) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- 4) Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Desa, pasal 8 huruf g nomor 12 tentang Pendataan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif.

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam kajian kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur adalah:

- 1) Bagaimana kondisi kemiskinan (*Exisisting*) di Kabupaten Luwu Timur?
- 2) Apa saja indikator kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 3) Apa saja penyebab kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 4) Bagaimana karakteristik kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 5) Apa saja permasalahan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 6) Bagaimana manajemen pendataan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?
- 7) Apa prioritas program untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur?

1.4. Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan kajian kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis kondisi kemiskinan (*Exisisting*) di Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Untuk mengidentifikasi indikator kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

- 4) Untuk menganalisis karakteristik kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 5) Untuk menganalisis permasalahan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 6) Untuk menganalisis manajemen pendataan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 7) Untuk merumuskan prioritas program untuk pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan penyusunan Kajian Kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur adalah:

- 1) Tersusunnya konsep kemiskinan berdasarkan indikator lokal kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 2) Terumuskannya kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur.
- 3) Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pengentasan kemiskinan secara komprehensif di Kabupaten Luwu Timur.

1.5. Ruang Lingkup

1) Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah studi ini adalah wilayah Kabupaten Luwu Timur.

2) Lingkup Materi

Secara keseluruhan studi ini akan mengakomodasikan aspek-aspek yang dianalisis meliputi:

- a) Kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.
- b) Kemiskinan absolute adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi.
- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- d) Kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan.

1.6. Metodologi

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative research*) yang bertujuan untuk memahami objek yang diteliti secara mendalam dan tidak untuk membuat generalisasi, melainkan membuat penjelasan mendalam atas makna dibalik objek studi, (Creswell, 2010). Metode ini bertujuan untuk mengungkap proses, interpretasi makna dan pengungkapan keadaan atau perilaku individu secara holistik, (Yin, 2011). Menurut Gunawan (2015) penelitian kualitatif berupaya membangun pemahaman (*verstehen*) dan penjelasan atas perilaku manusia sebagai makhluk sosial. Strategi yang digunakan adalah *Partisipatory Rural Aprasial* (PRA) dengan alat Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP).

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur, dengan memilih 4 (empat) klaster berdasarkan kondisi geografis dan topografi wilayah, yaitu :

1. Klaster Pegunungan
2. Klaster Pesisir
3. Klaster Pertambangan
4. Klaster Pertanian

2) Waktu Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, sejak dimulainya kegiatan awal, dengan matriks kegiatan sebagai berikut:

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur

No	Uraian kegiatan	Agust.	Sept.				Okt.				Nop	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
1.	Tahap Persiapan											
	- Persiapan tim studi											
	- Identifikasi desa miskin											
	- Penyusunan rencana kerja											
	- Metodologi dan penetapan instrumen											
2.	Tahap Survei											

No	Uraian kegiatan	Agust.	Sept.				Okt.				Nop	
		4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
	Lapangan											
	- Assesment dan analisis data sekunder											
	- FGD tingkat wilayah/klaster/desa											
	1. Desa Harapan											
	2. Desa Matano											
	3. Desa Batu Putih											
	4. Desa Pattengko											
3.	Tahap Penyusunan Fakta dan Analisa											
4.	Tahap Penyusunan Kajian Kemiskinan											
	1. Laporan Pendahuluan											
	2. Laporan Kemajuan											
	3. Laporan Akhir											

c. Sumber Data

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam (indepth interview) informan terpilih dengan menggunakan daftar pertanyaan kunci tersebut, bisa saja berkembang sesuai dengan keadaan lapangan. Wawancara mendalam merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian, terutama dalam penelitian kualitatif. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa :

- a. Data mengenai aktifitas masyarakat
- b. Data mengenai sumber penghidupan masyarakat
- c. Data mengenai aktifitas kelembagaan
- d. Data mengenai manajemen keuangan
- e. Data mengenai potensi, permasalahan dan solusi

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang menjadi penunjang dalam penelitian ini yang di peroleh dari hasil kajian pustaka. Agar semua data atau informasi yang dibutuhkan dapat dikumpulkan, maka sebelum dilaksanakan peneltian, terlebih dahulu ditetapkan data-data yang dibutuhkan, sumber-sumber yang dapat ditelaah, juga instansi-instansi mana saja yang harus dihubungi untuk mengumpulkan data dan atau informasi yang dibutuhkan. Data-data sekunder diantaranya adalah dokumen laporan yang ada pada instansi sepertidari Badan Pusat Statistik, Dinas Sosial dan Desa.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) **Observasi.** Secara umum, observasi berarti pengamatan, penglihatan, sedangkan secara khusus, dalam dunia penelitian, observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap suatu fenomena. Menurut Creswell (2016) bahwa Teknik pengumpulan data dengan observasi merupakan teknik yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu kelompok dan organisasi yang berkaitan dengan aktifitas masyarakat di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat aktifitas dalam lokasi penelitian. Selain itu peneliti dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non partisipan hingga partisipan utuh (Creswell, 2009).
- 2) **Wawancara,** Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab secara lisan (Kartono, 1980; Gunawan, I. 2015). Sedangkan menurut (Denzin dan Lincoln 1994; Gunawan, I. 2015) bahwa wawancara merupakan suatu percakapan, seni tanya jawab dan mendengarkan yang dilakukan secara berkali-kali. Wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan yang terlibat dalam aktivitas masyarakat. Wawancara dilakukan dengan menggunakan

daftar pertanyaan sebagai pedoman di lapangan yang telah disiapkan sebelumnya.

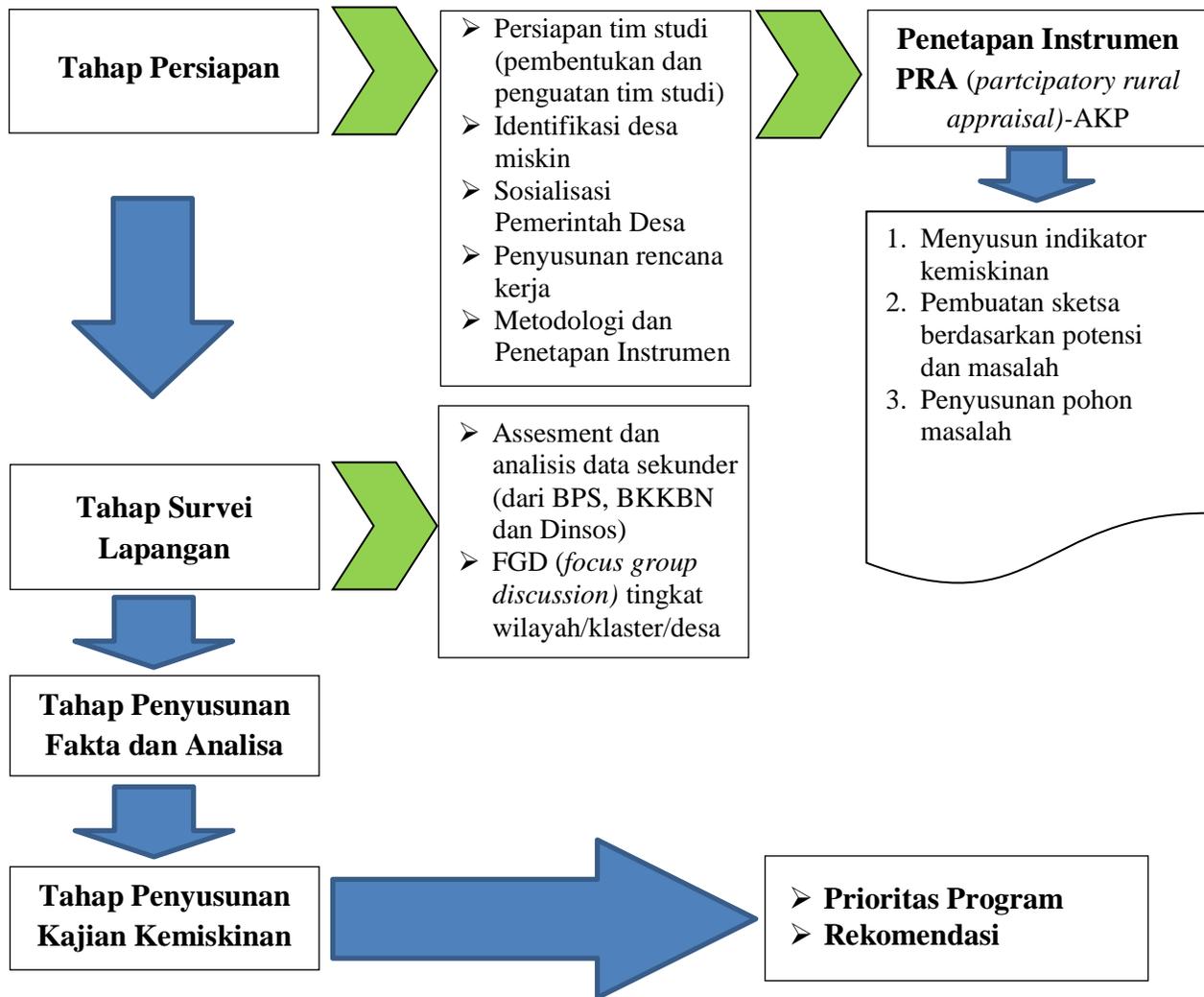
- 3) **Focus Group Discussion (FGD)**, merupakan diskusi dalam kelompok yang dilakukan di bertujuan untuk penyamaan persepsi tentang tema yang akan diteliti terdiri dari unsur Akademisi, Instansi terkait (Bappelitbangda, BPS, Dinas Sosial, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) dan Masyarakat di desa.
- 4) **Catatan Harian**, Catatan harian atau catatan lapangan merupakan instrumen utama yang melekat pada beragam teknik pengumpulan data kualitatif. Terdapat tiga jenis catatan harian:
 1. Catatan Fakta: data kualitatif hasil pengamatan dan wawancara dalam bentuk uraian rinci maupun kutipan langsung maupun gerakan tubuh (gesture) yang terlihat saat melakukan aktivitasnya.
 2. Catatan Teori: hasil analisis peneliti di lapangan untuk menyimpulkan struktur masyarakat yang ditelitinya, serta merumuskan hubungan antara topik-topik (“variabel”) penting penelitiannya secara induktif sesuai fakta-fakta di lapangan.
 3. Catatan Metodologis: pengalaman peneliti ketika berupaya menerapkan metode kualitatif di lapangan.
- 5) **Dokumentasi**, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya seseorang atau lembaga. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari dokumen dan rekaman. Dalam arti luas dokumen berupa setiap proses

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan atau gambar (foto) dan karya monumental. Sedangkan (Lincoln dan Guba 1994; Gunawan (2015) mengartikan rekaman sebagai setiap tulisan atau pernyataan yang dipersiapkan oleh dan untuk individual atau organisasi dengan tujuan membuktikan adanya suatu peristiwa. Creswell (2016) menjelaskan bahwa dokumentasi adalah kumpulan dokumen berupa dokumen publik (Koran, makalah, laporan) ataupun dokumen privat (buku harian, diari surat dan email).

- 6) **Audio Visual**, Menurut Creswell (2016), audio visual merupakan kategori terakhir dari tehnik pengumpulan data kualitatif dimana materi audio visual data ini berupa foto, film, objek-objek seni, videotape atau segala jenis suara atau bunyi.

Teknik Analisis Data

Proses dan mekanisme Penyusunan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:



Gambar1. Alur kegiatan penelitian pemetaan kemiskinan di Kab. Luwu Timur

1) Tahap Persiapan

Tahap persiapan yang dilakukan sebelum melakukan analisis kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pemetaan masyarakat miskin berdasarkan indikator lokal, ada beberapa persiapan yang dilakukan adalah;

a. Pembentukan dan Penguatan Tim Studi

Pembentukan Tim studi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andi Djemma. Tugas Tim studi adalah untuk melakukan proses analisis kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/desa yang ditentukan berdasarkan klaster/wilayah pesisir, klaster/wilayah pegunungan, klaster/wilayah pertanian, dan klaster/wilayah pertambangan. Koordinasi dan penguatan Tim studi bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tim, sehingga dapat memahami konsep analisis kemiskinan partisipatif.

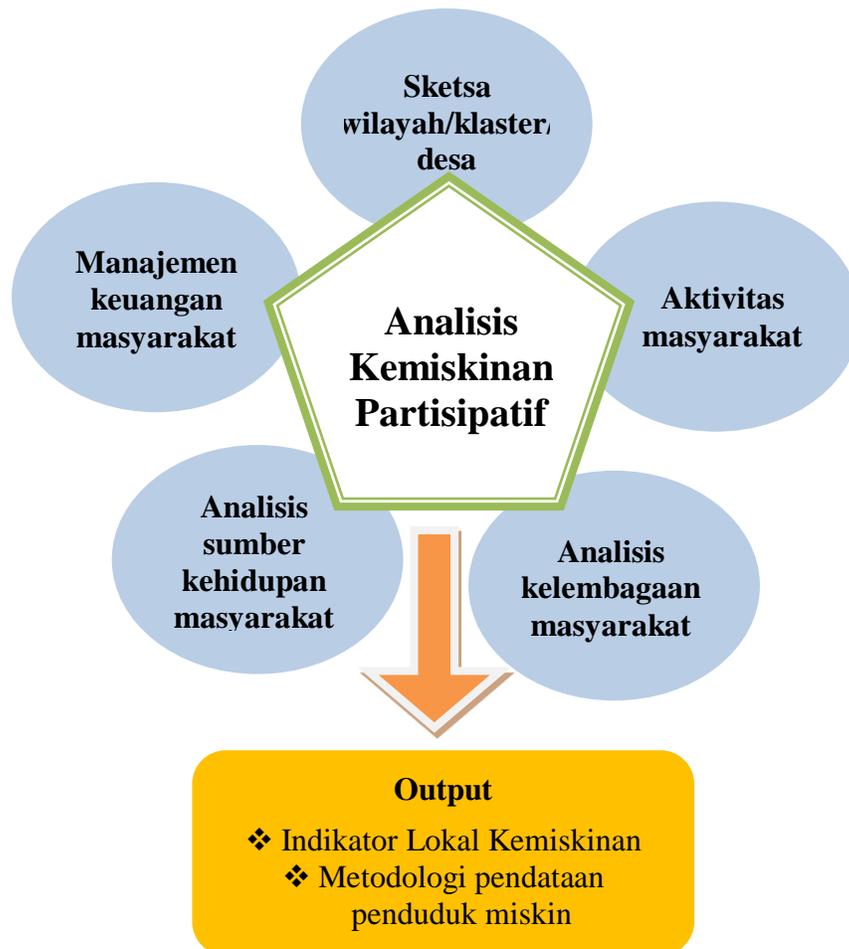
b. Penyusunan Rencana Kerja

Rencana kerja disusun untuk disepakati oleh seluruh anggota Tim dan jika memungkinkan disosialisasikan kepada masyarakat. Rencana kerja disusun dan disesuaikan dengan masing-masing sketsa wilayah/klaster, yang memuat:

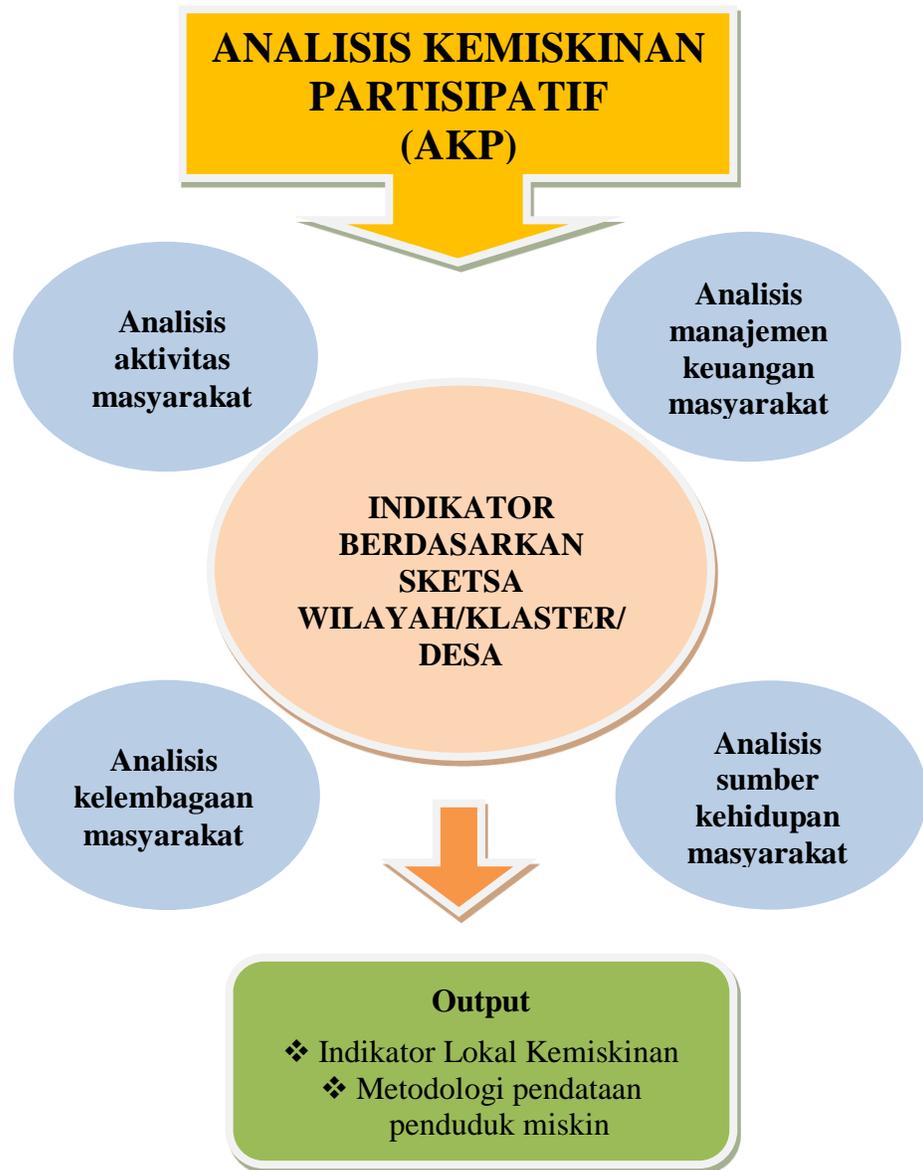
- ❖ Waktu pelaksanaan
- ❖ Tempat pelaksanaan
- ❖ Nama kegiatan
- ❖ Output yang diharapkan
- ❖ Peserta yang akan diundang
- ❖ Perlengkapan yang dibutuhkan

c. Metodologi AKP dan Penetapan Instrumen

Metode pendekatan studi menggunakan Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP) untuk mendapatkan gambaran/pemetaan kemiskinan untuk menemukan indikator lokal kemiskinan. AKP memiliki peran dalam rangka memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengidentifikasi diri mereka sendiri dan menyuarakan kepentingannya serta kemungkinan solusi yang bisa dilakukan. Instrument yang digunakan untuk melakukan analisis kemiskinan partisipatif yaitu;



Gambar 2. Metodologi Analisis Kemiskinan Partisipatif



Gambar 3. Metodologi Analisis Kemiskinan Partisipatif

- (1) Indikator berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa ditentukan berdasarkan potensi dan kondisi geografis wilayah/desa;
 - ❖ Klaster Pesisir
 - ❖ Klaster Pegunungan
 - ❖ Klaster Pertanian
 - ❖ Klaster Pertambangan
- (2) Indikator berdasarkan aktivitas masyarakat
Matriks kalender kegiatan masyarakat (harian, bulanan, musiman, dan tahunan)
- (3) Indikator berdasarkan manajemen keuangan masyarakat merupakan analisis pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh masyarakat.
- (4) Indikator berdasarkan analisis sumber kehidupan masyarakat
 - ❖ Petani
 - ❖ Buruh tani/bangunan/dll.
 - ❖ Nelayan
 - ❖ Dll.
- (5) Indikator berdasarkan analisis kelembagaan masyarakat
 - ❖ Kelembagaan petani
 - ❖ Kelembagaan keuangan/ekonomi
 - ❖ Kelembagaan pemerintah
 - ❖ Dll.

2) Tahap Survei Lapangan

Tahap survei lapangan ini bertujuan untuk mendapatkan beberapa data kemiskinan beserta indikatornya yang dipergunakan oleh BPS, BKKBN, dan Dinsos.

a) Assesment dan Analisis Data Sekunder

- ❖ Assessment merupakan kegiatan yang dilakukan tim untuk mengumpulkan beberapa data kemiskinan dari BPS, BKKBN, dan Dinsos. Data kemiskinan yang diperoleh kemudian dijadikan dasar oleh tim untuk melakukan analisis selanjutnya.
- ❖ Analisis hasil assessment dapat dilaksanakan dalam beberapa bentuk kegiatan, seperti diskusi. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar oleh tim untuk menentukan sketsa wilayah atau klaster berdasarkan masing-masing wilayah, seperti wilayah/klaster/desa pesisir, wilayah/klaster/desa pegunungan, wilayah/klaster/desa pertanian, dan wilayah/klaster/desa pertambangan.

b) FGD tingkat wilayah/klaster/desa

Focus group discussion atau FGD ditingkat wilayah/klaster/desa merupakan kegiatan diskusi yang melibatkan masyarakat dari beberapa unsur. FGD dilaksanakan di 4 wilayah/klaster/desa berdasarkan sketsa wilayah yang telah ditentukan yaitu wilayah/klaster pesisir, wilayah/klaster pegunungan, wilayah/klaster pertanian, dan wilayah klaster pertambangan. Secara teknis sebagai berikut:

(1) Penanggungjawab

Sebagai penanggungjawab kegiatan ini adalah Ketua LPPM Universitas Andi Djemma

(2) Kepanitiaan

Tim yang telah dibentuk/ditugaskan oleh LPPM Universitas Andi Djemma

(3) Fasilitator

Fasilitator adalah Tim AKP yang bertugas memfasilitasi seluruh proses FGD sampai dengan penyusunan laporan akhir FGD.

(4) Peserta

Peserta FGD yang diundang adalah beberapa elemen masyarakat dan Peserta harus merepresentasikan dari unsur:

- ❖ Tokoh masyarakat
- ❖ Tokoh agama
- ❖ Masyarakat peneriman PKH atau bantuan sosial
- ❖ Pemerintah desa
- ❖ Pakar

3) Tahap Penyusunan Fakta dan Analisa

4) Tahap Penyusunan Kajian Kemiskinan

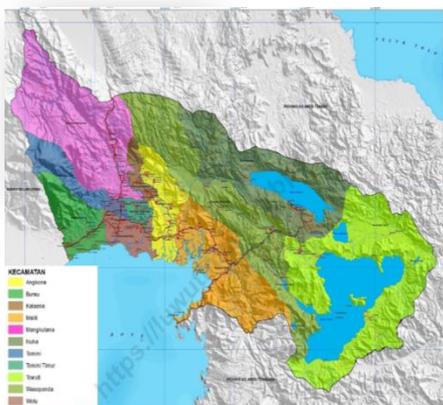
1.7. Luaran

Keluaran yang dihasilkan dalam pekerjaan Penyusunan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur;

- ❖ Variabel indikator penduduk miskin berdasarkan wilayah/klaster/desa
- ❖ Kriteria penduduk miskin berdasarkan indikator lokal
- ❖ Metodologi pendataan penduduk miskin

BAB 2

GAMBARAN UMUM DAERAH



2.1. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Luwu Timur terletak di sebelah selatan katulistiwa. Tepatnya di antara $2^{\circ}03'00''$ - $3^{\circ}03'25''$ Lintang Selatan dan $119^{\circ}28'56''$ - $121^{\circ}47'27''$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 6,944.88 km².

Sekitar 11,14 persen Propinsi Sulawesi Selatan merupakan luas wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur merupakan Kabupaten paling timur di Propinsi Sulawesi Selatan yang berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tengah di sebelah Utara. Sedangkan di sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Teluk Bone. Sementara itu, batas sebelah Barat merupakan Kabupaten Luwu Utara.

Kabupaten Luwu Timur yang beribukota di Malili, secara administrasi dibagi menjadi 11 kecamatan yaitu Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Angkona, Malili, Towuti, Nuha, Wasuponda, Mangkutana dan Kalaena serta 99 kelurahan/Desa. Selain itu, di Kabupaten Luwu Timur juga terdapat lima danau. Kelima danau tersebut antara lain danau Matano (dengan luas 245.70 km²), Danau Mahalona (25 km²), dan Danau Towuti (585 km²), Danau Tarapang Masapi (2.43 km²) dan Danau

Lontoa (1.71 km²). Danau Matano terletak di Kecamatan Nuha sedangkan keempat danau lainnya terletak di Kecamatan Towuti.

2.2. Kependudukan

Penduduk Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk interim 2022-2023 (kondisi pertengahan tahun /Juni) sebanyak 300.511 jiwa dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 105,99. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Dibandingkan dengan hasil sensus Penduduk 2020, penduduk Luwu Timur tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebanyak 3.770 atau sebesar 1,27 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 mencapai 43,27 jiwa/km². Kepadatan penduduk di kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Tomoni Timur dengan kepadatan sebesar 309,77 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Mangkutana sebesar 17,15 jiwa/km².

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur sebanyak 300.511 jiwa, berada di urutan ke 13 dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di wilayah Luwu Raya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat/urutan ketiga setelah Kabupaten Luwu dan Luwu Utara.

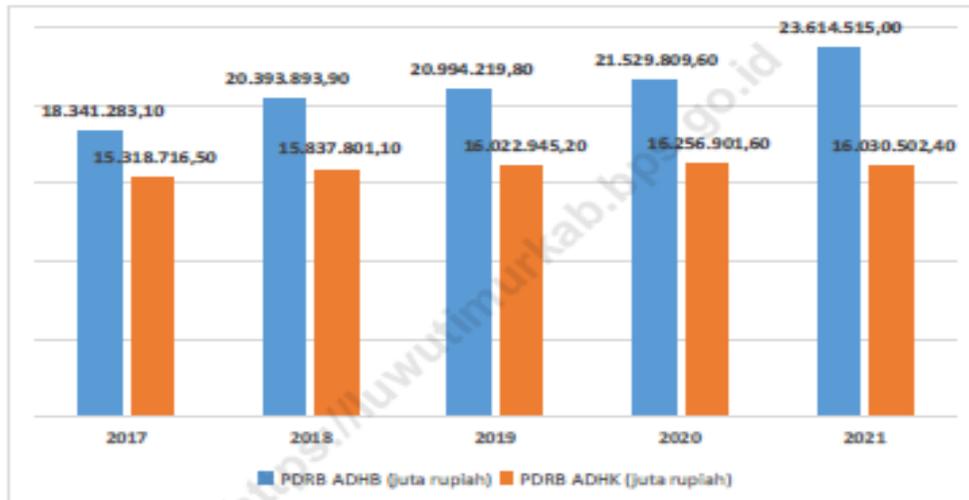
Tabel 2. Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk Penduduk per Km² dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur, 2021

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (Jiwa) Population	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021 Annual Population Growth Rate (%) 2020–2021
(1)	(2)	(3)
Burau	34 306	0,27
Wotu	33 657	0,94
Tomoni	26 644	0,90
Tomoni Timur	13 602	0,64
Angkona	25 247	0,69
Malili	43 640	1,90
Towuti	43 586	3,56
Nuha	23 575	0,75
Wasuponda	21 840	1,06
Mangkutana	22 316	0,38
Kalaena	12 098	0,55
Luwu Timur	300 511	1,27

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

Berdasarkan hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha Kabupaten Luwu Timur mencapai 23,61 triliun rupiah. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Timur tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha pertambangan dan penggalian, yaitu mencapai 43,99 persen. Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2021 menurun. Nilai PDRB Kabupaten Luwu Timur atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,03 triliun rupiah. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi perlambatan ekonomi sebesar 1,39 persen.

Gambar 4. Produk Domestik Regional Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur (Juta Rupiah) 2017-2021



Sumber/Source: Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Based on census, surveys and others sources

Tabel 3. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021



Sumber/Source: Diolah dari hasil sensus, survei dan berbagai sumber lainnya/Based on census, surveys and others sources

Laju pertumbuhan PDRB 2021 atas dasar harga konstan 2010 Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan sebesar 4,65 %, nilai ini tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur yang mengalami kontraksi sebesar -1,39%.

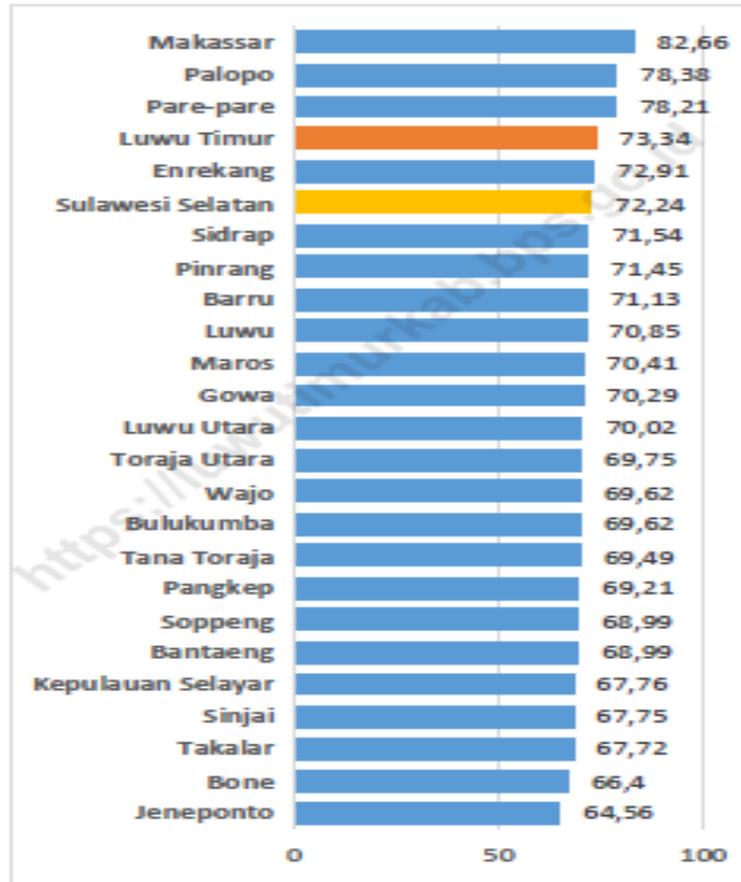
2.4. Ketenagakerjaan

Angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur sebanyak 162.182 jiwa, 154.130 jiwa diantaranya bekerja pada seminggu terakhir (95,04 persen). Jumlah pencari kerja terdaftar di Kabupaten Luwu Timur pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sosial Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebanyak 2.832 orang. Perbandingan pencari kerja perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki tercatat pada tahun 2020 sebanyak 1.679 laki-laki dan 1.153 perempuan pencari kerja yang terdaftar.

2.5. Indeks Pembangunan Manusia

Berdasarkan hasil penghitungan IPM menggunakan metode baru, angka IPM Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 sebesar 73,34 menempati peringkat 4 tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, sama dari tahun sebelumnya. Pembangunan manusia di Kabupaten Luwu Timur sejak tahun 2017 sudah berstatus tinggi. Selama periode 2017-2021 angka IPM Kabupaten Luwu Timur selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Selain itu juga selalu berada diatas IPM Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 4. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



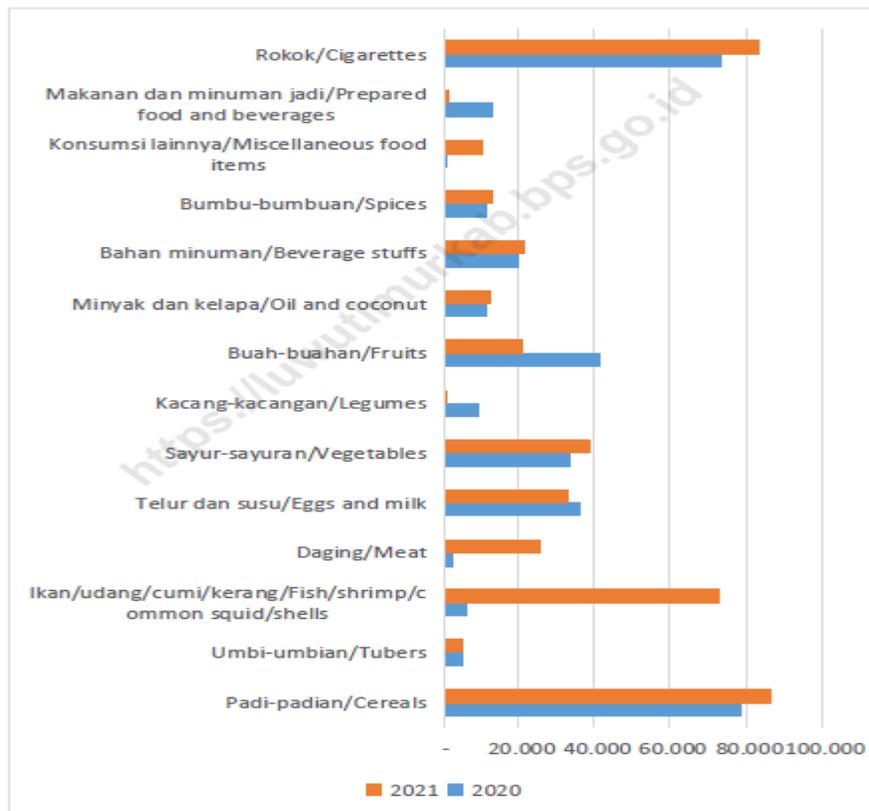
Sumber/Source : BPS - Survei Sosial Ekonomi Nasional / Statistics Indonesia - National Socio-Economic Survey

2.6. Pengeluaran Penduduk (Pengeluaran Perkapita)

Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret 2021, pengeluaran konsumsi dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu pengeluaran kelompok makanan dan kelompok non makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tertinggi menurut kelompok makanan yaitu komoditas makanan dan minuman jadi sebesar 129.800 rupiah atau sebesar 10,24 % dari rata-rata total pengeluaran makanan. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan tertinggi

menurut kelompok bukan makanan yaitu komoditas perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 337.756 rupiah, atau sebesar 26,66 % dari rata-rata total pengeluaran bukan makanan.

Tabel 5. Rata-rata pengeluaran perkapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 dan 2021



Sumber/Source: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat/BPS-Statistics Indonesia, People's Welfare Statistics

BAB 3

PROFIL KEMISKINAN

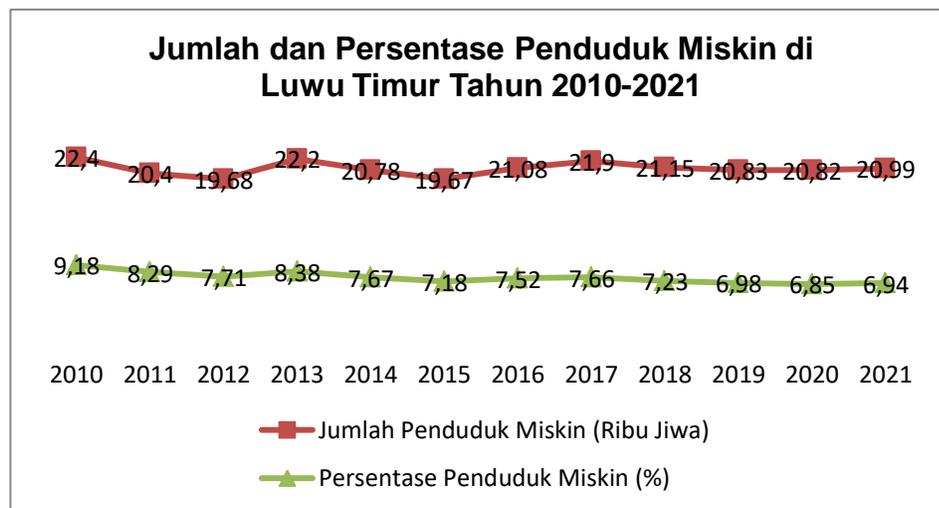
3.1. Kondisi Kemiskinan (Exisisting)

Kemiskinan didefinisikan sebagai keadaan di mana seorang individu atau sekelompok orang tidak dapat menggunakan hak fundamental mereka untuk mempertahankan dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Di antara hak-hak dasar tersebut adalah pemenuhan kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, tanah, sumber daya alam, dan lingkungan, rasa aman dari kekerasan atau ancaman kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam sosial politik. kehidupan.

Menurut para ahli, kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan serta keterampilan; dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah. Selain itu, dimensi-dimensi kemiskinan juga saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini berarti bahwa kemajuan dan kemunduran pada salah satu aspek dapat mempengaruhi kemajuan atau kemunduran pada aspek lainnya. Dan aspek lainnya dari kemiskinan

ini adalah bahwa yang miskin itu adalah manusianya, baik secara individual maupun kolektif (Arsyad, 2010).

Menurut statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Luwu Timur bervariasi antara tahun 2010 hingga 2021, bahkan cenderung turun dari tahun 2017 hingga 2020. Pada tahun 2017, penduduk miskin di Lutim sebanyak 21,90 ribu jiwa atau 7,66 persen; tahun 2018 sebesar 21,15 ribu atau 7,23 persen; tahun 2019 sebanyak 20,83 ribu orang atau 6,98 persen; dan pada 2020 hanya 20,82 atau 6,85 ribu jiwa. Sedangkan pada tahun 2021 meningkat menjadi 20,99 atau sebesar 6,94% atau sebesar 20,99 ribu jiwa. Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.



3.2. Indikator Kemiskinan

Indikator kemiskinan merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) melalui kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur. Melalui analisis kemiskinan partisipatif (AKP) dihasilkan indikator lokal kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa.

Indikator kemiskinan merupakan hasil dari Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) melalui kegiatan Kajian Kemiskinan Kabupaten Luwu Timur. Melalui analisis kemiskinan partisipatif (AKP) dihasilkan indikator lokal kemiskinan berdasarkan sketsa wilayah/klaster/desa. Adapun indikator kemiskinan lokal dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Indikator lokal kemiskinan kabupaten Luwu Timur

No	Aspek	Indikator	Metode
1	Tempat Tinggal	<ul style="list-style-type: none"> - Rumah kayu dengan atap rumbia/Rumah pondok dengan atap daun sagu - Rumah dengan lantai kayu atau tanah - Menumpang di rumah keluarga/orang lain 	1. Survei 2. In Depht Interview 3. FGD Alat yang digunakan dalam FGD ✓Kalender musim ✓Diagram ✓Kelembagaan ✓Analisis pohon
2	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki pekerjaan tetap/Buruh tani/Buruh bangunan/Nelayan dengan alat 	

No	Aspek	Indikator	Metode
		tangkap sederhana (tradisional)	masalah
3	Kepemilikan Aset	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak memiliki lahan atau Memiliki lahan < 0.5 hektar - Tidak memiliki kendaraan roda 2 atau Memiliki kendaraan roda 2 tapi di kredit - Tidak memiliki perhiasan emas atau memiliki tapi sederhana/imitasi 	<ul style="list-style-type: none"> ✓Kalender harian ✓Analisis pendapatan keluarga
4	Ekonomi/Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendapatan maksimal Rp.50.000/hari - Tidak memiliki tabungan - Kesulitan menyekolahkan anak dri hasil pendapatan - Pola makan tidak teratur - Tidak memiliki satu Smartphone dalam Satu Keluarga 	
5	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> -Pendidikan anggota keluarga (anak) maksimal SMP -keterbatasan akses 	

No	Aspek	Indikator	Metode
		pada sarana pendidikan	

Sumber : Data Primer diolah 2022

3.3. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan di lingkungan bermacam-macam



sebab dan akibat untuk mencari penyebab masalah kemiskinan di Luwu Timur. Analisis pohon masalah ini digunakan untuk membantu dalam membentuk pola pikir yang lebih terstruktur dan berdasarkan fakta (data) untuk mencari penyebab dari suatu masalah kemiskinan yang sudah teridentifikasi dan menjadi prioritas.

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan penyebab kemiskinan pada klaster desa sebagai berikut

a. Analisis aktifitas masyarakat.

Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari aktifitas masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan data bahwa masyarakat pada

empat klaster yang berbeda memiliki aktifitas yang berbeda pula. Masyarakat nelayan di desa pada wilayah pesisir (Desa Harapan) yang berprofesi sebagai nelayan hanya 4 (empat) bulan melakukan operasi penangkapan ikan. Hal ini juga di perparah dengan terjadinya degradasi lingkungan, yang menyebabkan wilayah fishing ground (daerah penangkapa ikan), yang semakin jauh. Konsekuensinya adalah pertambahan biaya operasional yang dibutuhkan oleh nelayan saat melakukan operasi penangkapan ikan. Data aktifitas nelayan di Desa Harapan dapat dilihat pada lampiran 1a.

Sedangkan pada klaster wilayah pertanian (Desa Pattengko), komoditi yang diusahakan adalah padi dengan dua kali panen dalam setahun yaitu pada bulan Februari-maret dan bulan Juli-Agustus. Ada jeda selama tiga bulan yang tidak mendapatkan penghasilan. Hal yang sama juga terjadi pada klaster pegunungan (Desa Batu Putih) yang mengusahakan tanaman diperkebunan yaitu tanaman kakao dan kelapa sawit yang belum berproduksi maksimal.

Masyarakat nelayan dan petani pada lokasi penelitian, menjadi kelompok yang rentan karena waktu melaut sebagai sumber nafkah yang sangat singkat (hanya 4 bulan) dalam setahun. Selebihnya mereka menganggur atau mencari pekerjaan alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Mereka melakukan strategi diversifikasi maupun pola nafkah ganda untuk mengurangi kerentanan penghidupan atau meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu alternatif mata pencaharian adalah bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian. Aktifitas kegiatan pertanian dapat dilihat pada lampiran 1c.

Strategi diversifikasi penghidupan terjadi karena berbagai alasan, seperti alasan kebutuhan atau bagi orang tertentu mungkin diversifikasi penghidupan merupakan suatu pilihan. Alasan untuk melakukan diversifikasi sebagai sumber pendapatan bervariasi untuk keluarga yang berbeda serta waktu dan tempat yang berbeda.

Diversifikasi penghidupan dilakukan melalui diversifikasi pekerjaan seperti dari pekerjaan sebagai nelayan atau petani beralih atau mengusahakan pekerjaan disektor non pertanian.

Beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan adalah menjadi buruh bangunan, kerja serabutan, jual kue dan berdagang keliling, online dan lain-lain. Menurut Dercon (2002), bahwa pembahasan mengenai diversifikasi pendapatan sering dikaitkan dengan upaya penanggulangan resiko, kesempatan atau ketidakpastian pendapatan atas tenaga kerja dan lahan. Ditingkat rumah tangga, diversifikasi melalui penganeekaragaman usaha dan pemanfaatan aset, selain dimaksudkan untuk mencari nilai tambah kapital juga untuk mengurangi instabilitas pendapatan rumah tangga.

b. Analisis manajemen keuangan masyarakat

Analisis manajemen keuangan masyarakat adalah suatu cara untuk mengetahui metode yang dilakukan masyarakat dalam mengelola penerimaannya. Modal finansial adalah sumber-sumber keuangan yang dapat digunakan dan dimanfaatkan masyarakat dalam mencapai tujuan penghidupan mereka, yaitu Cadangan atau persediaan;

meliputi sumber keuangan berupa tabungan, deposito, atau barang bergerak yang mudah diuangkan. Selain yang bersumber dari milik pribadi, juga termasuk sumber keuangan yang disediakan oleh bank atau lembaga perkreditan.

Aliran dana teratur, sumberdana ini meliputi uang pensiun, gaji, bantuan dari negara, kiriman dari kerabat yang merantau, dsb. (DFID, 2001). Modal ini mewakili unsur sumber-sumber keuangan yang ada di masyarakat (seperti penghasilan, tabungan atau simpanan, pinjaman modal usaha, sertifikat surat berharga, saham, kredit/hutang/hibah baik fomal maupun informal, kiriman dari keluarga yang bekerja di luar daerah, dana pensiun, keuntungan usaha, upah/gaji,dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang derajat kehidupan masyarakat. Menurut Ellis (2000), bahwa modal finansial mengacu pada rumahtangga yang memiliki akses terhadap sumber modal keuangan, terutama tabungan dan akses terhadap kredit dalam bentuk pinjaman.

Baik tabungan maupun pinjaman uang secara langsung merupakan bentuk-bentuk modal produktif yang dapat dialihkan kedalam bentuk-bentuk modal lain atau mungkin langsung dikonsumsi. Kemudahan beralih antara menggunakan sebagai modal usaha atau langsung dikonsumsi merupakan karakteristik dasar modal dalam bentuk uang tunai. Dalam banyak masyarakat, tidak adanya pasar keuangan atau ketidakpercayaan terhadap lembaga-lembaga keuangan mengakibatkan pengalihan modal finansial diselenggarakan dalam bentuk lain, seperti kepemilikan ternak

yang memainkan peran penting sebagai penyimpanan kekayaan.

Dari pengertian diatas, modal finansial adalah sejumlah uang yang dapat dipergunakan untuk membeli atau sejumlah uang yang dihimpun atau ditabung untuk investasi dimasa depan oleh suatu rumahtangga. Modal finansial merupakan sumberdaya yang paling fleksibel, dapat ditukar dengan berbagai kemudahan sesuai sistem yang berlaku. Sumberdaya keuangan juga dapat digunakan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan penghidupan; misalnya membeli bahan makanan. Modal finansial dalam penelitian ini, mengacu pada sumber-sumber keuangan penduduk yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan. Indikator modal finansial meliputi: Tabungan atau simpanan; Kredit/hutang, hibah baik formal maupun informal; Pemberian dari LSM/ BAZIS/ LAZIS, BL; Kiriman dari keluarga yang bekerja di luar daerah; Keuntungan usaha; Upah/Gaji.

Pada daerah penelitian terlihat bahwa alokasi pendapatan masyarakat nelayan di desa Harapan habis hanya untuk konsumsi rumahtangga., tidak ada alokasi untuk tabungan (dissaving). Demikian pula terjadi pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan bekerja dari sektor perkebunan. Penerimaan yang diperoleh habis untuk konsumsi rumah tangga, biaya sekolah bahkan pada kategori masyarakat miskin, tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Masyarakat miskin pada wilayah penelitian umumnya tidak memiliki

modal finansial yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan/operasi penangkapan ikan dan pertaniannya.

c. Analisis sumber penghidupan

Analisis sumber penghidupan merupakan suatu analisis untuk mengetahui sumber-sumber nafkah atau aset yang dimiliki untuk menghasilkan nafkah. Aset tersebut berupa aset/modal fisik, modal alam dan modal manusia.

Modal fisik adalah prasarana dasar dan fasilitas lain yang dibangun untuk mendukung proses penghidupan masyarakat. Prasarana yang dimaksud meliputi pengembangan lingkungan fisik yang membantu masyarakat dalam melaksanakan tugas kehidupan lebih produktif. Prasarana umumnya merupakan fasilitas umum yang digunakan tanpa dipungut biaya langsung.

Modal fisik memperlihatkan penguasaan lahan, luas lahan, jenis tanaman budidaya, dan kepemilikan bangunan seperti rumah, kendaraan, perabotan dan peralatan rumahtangga, pabrik serta teknologi produksi. Dalam konteks kewilayahan modal fisik ini berupa infrastruktur jalan, irigasi, dan fasilitas publik. (Baiquni, 2007). Modal Infrastruktur termasuk; Jaringan transportasi, kendaraan, dsbnya, Gedung dan tempat tinggal, Sarana Kebersihan dan Air bersih, Energi, Jaringan Komunikasi. Teknologi dan Alat-alat; Alat alat dan peralatan untuk produksi, Bibit, pupuk, pestisida, Teknologi tradisional. Modal ini juga mewakili unsur bangunan (seperti : perumahan, pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya) dan infrastruktur dasar (seperti: jalan, jembatan,

jaringan air minum, jaringan telepon, dan sebagainya) yang merupakan sarana yang membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Modal ini merupakan salah satu aset dalam memfasilitasi peningkatan penyediaan layanan untuk memungkinkan penduduk miskin memenuhi kebutuhan mereka. Modal fisik dalam penelitian ini merupakan sarana atau fasilitas yang dimiliki responden untuk dalam menjalani kehidupan.

Modal fisik pada daerah penelitian cukup memadai dimana tersedia dermaga untuk berlabuhnya perahu nelayan. Sedangkan untuk lokasi pertanian, ketersediaan jalan tani tersedia. Kecuali pada wilayah Desa Matanodimana akses ke lahan yang belum maksimal. Keterbatasan akses/jalan tani ke kebun petani menjadi permasalahan tersendiri yang mengakibatkan tidak maksimalnya pengolahan lahan mereka.

Modal alam bisa disebut dengan sumberdaya alam adalah merupakan persediaan alam yang menghasilkan daya dukung dan nilai manfaat bagi penghidupan manusia. Mencakup; tanah dan produksinya, air dan sumber daya air di dalamnya (ikan), pohon dan hasil hutan, binatang buruan, serat dan pangan yang tidak dibudidayakan, keanekaragaman hayati, sesuatu kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan. Modal ini mewakili sumber daya alam dan sumber daya hayati yang melingkupi suatu masyarakat (DFID, 2001)

Modal alam (Natural Capital) lebih menggambarkan kepemilikan atau penguasaan bersama atas sumberdaya alam seperti iklim, kesuburan tanah, dan sumber air sebagai modal

produksi. Hal ini bervariasi pada setiap wilayah, baik ketersediaan maupun karakteristiknya, sehingga dapat membentuk pola kehidupan masyarakat. Dalam modal alam, sebuah perbedaan penting di buat antara sumberdaya alam terbarukan dan sumberdaya alam non terbarukan. (Baiquni, 2007). Dari pengertian diatas, modal alam ini disebut juga sebagai lingkungan yang merupakan gabungan dari berbagai faktor biotik dan abiotik di sekeliling manusia. Modal ini dapat berupa sumberdaya yang bisa diperbaharui maupun tidak bisa diperbaharui. Contoh dari modal sumberdaya alam adalah air, pepohonan, tanah, stok kayu dari kebun atau hutan, stok ikan di perairan, maupun sumber daya mineral seperti minyak, emas, batu bara dan lain sebagainya. Pada akhirnya sumberdaya alam bisa menghasilkan keuntungan jika penduduk mempunyai akses yang aman terhadap modal alam ini.

Modal alam dalam penelitian ini, merupakan persediaan alam yang mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan seperti ketersediaan lahan pertanian/bibit, ketersediaan lahan untuk non pertanian, ketersediaan sumberdaya perikanan. Dengan modal alam memungkinkan penduduk dapat terfasilitasi untuk mendapatkan penghasilan, misalnya dengan menggunakan tanah atau lahan bukan saja untuk kegiatan produksi tetapi bisa untuk disewakan. Atau bagi nelayan sumberdaya danau bukan saja untuk kegiatan mencari ikan tetapi juga untuk membudidayakan ikan untuk mendapatkan penghasilan.

Pada daerah penelitian terjadi permasalahan dimana terjadi degradasi lingkungan akibat aktifitas pertambangan disekitar desa sehingga akses untuk mendapatkan sumber penghasilan semakin sulit. Kepemilikan lahan bagi petani yang gurem (0,5 ha) kebawah mengakibatkan usaha pertanian yang tidak menguntungkan dan hanya bersifat subsisten. Hal ini juga diperparah dengan tingginya biaya input untuk usaha tani padi. Ketersediaan input (pupuk dan pestisida) juga menurut petani tidak tepat waktu dan jumlahnya terbatas.

d. Analisis Kelembagaan

Masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan merupakan masalah dalam pembangunan yang membutuhkan peran kelembagaan untuk mengatasinya baik kelembagaan pemerintah maupun non pemerintah. Bank Dunia mendefinisikan lembaga sebagai aturan, mekanisme penegakan dan organisasi (Azansyah, 2013). Kelembagaan diharapkan mampu memperkuat modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat miskin dengan menjadi wadah interaksi. Modal sosial tersebut merupakan bagian dari kehidupan sosial-jaringan, norma dan kepercayaan, yang akan mendorong partisipasi dan tindakan bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan bersama dalam rangka peningkatan penghidupan mereka. Beberapa kelembagaan di desa yang dimaksud adalah kelembagaan ekonomi, sosial, agama, politik dan hukum.

Salah satu kelembagaan ekonomi di desa adalah Badan Usaha Miskin Desa (BUMDES). BUMDES diharapkan menjadi

tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa ternyata sebagian besar belum dapat berfungsi dengan maksimal. Sementara lembaga keuangan pada kasus kluster pegunungan (Desa Batuh Putih) belum terakses oleh masyarakat miskin.

Berdasarkan uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa penyebab kemiskinan pada 4 (empat) klaster wilayah disebabkan oleh kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial serta kondisi kultural (budaya).

1. Kondisi Alamiah dan Ekonomi (keterbatasan sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan lainnya sehingga produksi relatif kecil dan tidak dapat berpartisipasi dalam pembangunan) :
 - a. Faktor produksi yang terbatas-subsisten (petani gurem, luas lahan rata-rata 0,5 ha kebawah dan alat tangkapan yang tradisional).
 - b. Degradasi lingkungan dan keterbatasan prasarana dalam mengakses pengolahan lahan perkebunan
 - c. Keterbatasan SDM/petani rata-rata berusia diatas 50 tahun
2. Kondisi Struktural dan sosial (Tatanan kelembagaan dan kebijakan dalam pembangunan) :
 - a. Keterbatasan akses dan peran kelembagaan desa yang belum maksimal
 - b. Keterbatasan akses pada sumber penghidupan (lahan perkebunan)

- c. Keterbatasan akses pada modal finansial (dissaving) dan akses pada lembaga keuangan
3. Kondisi kultural (budaya) :
- a. Sikap atau kebiasaan hidup yang merasa kecukupan
 - b. Alokasi pendapatan atau sumberdaya yang dimiliki untuk kegiatan-kegiatan kebudayaan.

3.4. Karakteristik Kemiskinan

Soemardjan (dalam Sumodingrat 1999:81), mendeskripsikan berabagai cara pengukuran kemiskinan dengan standar yang berbeda-beda, dengan tetap memperhatikan dua kategori tingkat kemiskinan, sebagai berikut: **Pertama, kemiskinan absolut** adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan; **Kedua, kemiskinan relatif** adalah penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah. Kemiskinan jenis ini dikatakan relatif kerana berkaitan dengan distribusi pendapatan antar lapisan sosial.

Chambers (1983 : 109) mengungkapkan karakteristik kemiskinan sebagai ketidakmampuan (disadvantages) yang melingkupi orang miskin atau keluarga miskin antara lain: (a) poverty, (b) physical weakness, (c) isolation, (d) powerlessness.

Karakteristik kemiskinan pada 4 (empat) klaster wilayah penelitian diidentifikasi sebagai berikut :

Tabel 6. Karakteristik kemiskinan pada 4 (empat) klaster pada wilayah penelitian.

No.	Aspek-Aspek Terkait	Karakteristik
1	Kondisi Keluarga Miskin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bekerja pada sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, dengan hasil musiman. ✓ Lahan sempit atau tidak punya lahan sehingga menjadi petani penggarap atau buruh tani ✓ Pendidikan anak maksimal SMP
2	Program pemerintah untuk mengatasi persoalan keluarga miskin	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan Langsung Tunai (BLT), program PKH ✓ Beasiswa pendidikan untuk sarjana
3.	Hambatan orang miskin untuk menjadi orang yang mampu	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Penghasilan berkurang bahkan hilangnya mata pencaharian akibat degradasi lingkungan. ✓ Akses ke sumber mata pencaharian (kebun) yang terbatas ✓ Sumberdaya manusia yang terbatas dalam mengelola lahan pertanian/perkebunan.
4.	Meminimalisir dan mengatasi angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Masalah angka kemiskinan sulit untuk diminimalisir karena pendapatan masyarakat hanya cukup untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak dapat melakukan saving apalagi investasi ✓ Adanya penambahan data masyarakat miskin karena menjadi syarat untuk mendapatkan bantuan/beasiswa bagi anaknya.

Sumber : Data primer diolah 2022

3.5. Permasalahan Kemiskinan

Masalah kemiskinan pada wilayah penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut.

- a. Masalah kemiskinan adalah masalah kerentanan terhadap sumber penghidupan.
- b. Kemiskinan berarti tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja karena hubungan produksi dalam masyarakat tidak memberi peluang kepada mereka untuk berpartisipasi dalam proses produksi.
- c. Kemiskinan juga berarti menghabiskan sebagian besar bahkan seluruh penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas dan kuantitas terbatas.
- d. Tingginya rasio ketergantungan, karena jumlah keluarga yang besar.
- e. Adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

3.6. Manajemen Pendataan

Untuk menentukan kriteria penduduk miskin, disyaratkan beberapa hal mengenai cakupan dan definisi keluarga, pelaksana pendataan, kriteria penduduk miskin, dan alat analisis untuk menentukan penduduk miskin. Penanggung jawab pelaksanaan pendataan ini adalah pemerintah kabupaten/kota.

1. cakupan dan definisi keluarga dalam pendataan.

Cakupan dan Definisi Keluarga dalam Pendataan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menyebutkan bahwa satuan yang digunakan adalah penduduk dan

keluarga, bukan rumah tangga. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

2. Pelaksana Pendataan

Pelaksana pendataan harus memiliki persepsi yang sama tentang cara, definisi, dan variabel yang digunakan dalam pendataan. Untuk itu diperlukan pelatihan atau pengarahan kepada pelaksana ataupun koordinator pendataan di masing-masing wilayah. Untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pelaksana pendataan seharusnya adalah warga setempat yang komunikatif serta dapat membaca dan menulis. Karena merupakan warga setempat, pendata diharapkan mengetahui dengan baik kondisi sosial-budaya dan kebiasaan masyarakat yang akan didata seperti bahasa yang digunakan sehari-hari, waktu yang tepat untuk pendataan, dan hal-hal yang memudahkan untuk melakukan pendataan ulang (updating). Pendata harus komunikatif karena ia diharapkan bisa berkomunikasi dengan masyarakat setempat dengan baik sehingga data yang diperoleh adalah data nyata, data yang sebenarnya.

3. Kriteria penduduk miskin.

Dari berbagai kriteria untuk menentukan kemiskinan atau penduduk miskin yang ditetapkan oleh berbagai lembaga, kriteria kemiskinan diKabupaten Luwu Timur dilihat

melalui 5 Aspek yakni tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan asset, ekonomi, pendapatan dan pendidikan.

4. Alat analisis.

Untuk memperoleh variabel dan pembobotan dalam pemeringkatan kesejahteraan, data yang diperoleh dari proses pendataan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif .

BAB 4

PRIORITAS PROGRAM

Strategi pengentasan kemiskinan yang dikemukakan oleh Bank Dunia, bahwa setiap dekade strategi pengentasan kemiskinan mengalami perkembangan mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, pengembangan kesehatan dan pendidikan, perlindungan sampai dengan pemberdayaan kaum miskin.

Perbaikan keadaan kemiskinan dalam jangka pendek diantaranya menciptakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperbaiki distribusinya. Strategi jangka panjang dengan menumbuhkan swadaya setempat. Perbaikan dalam jangka panjang dengan memperbaiki dan memenuhi harkat hidup secara individual dan sosial yang bermartabat.

Program-program pengentasan kemiskinan pada Kabupaten Luwu Timur harus berdasarkan ketepatan waktu, cara dan sasaran. Berdasarkan hasil analisis profil kemiskinan di Luwu Timur dari empat klaster dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7. Prioritas Program

No.	Klaster	Masalah	Solusi	Program	Instansi Terkait
1	Pesisir	Degradasi lingkungan dan alat tangkap ikan yang tradisional	Bantuan alat tangkap ikan	✓ Kompensasi langsung ✓ Bantuan alat tangkap	Dinas Perikanan Dinas Lingkungan Hidup Badan usaha
		Waktu istirahat melaut akibat cuaca dan iklim	Diversifikasi mata sumber mata pencaharian melalui pemberdayaan masyarakat	✓ Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan Manajemen Kewirausahaan	DISDAGKOP dan UMKM Pemerintahan Desa Dinas Perikanan
2	Pertanian	Input produksi usaha tani yang tinggi	Penggunaan pupuk dan pestisida organik	✓ Pelatihan pembuatan pupuk dan pestisida organik	Dinas Pertanian
		Produksi Pertanian Yang	Pengelolaan Tanaman yang	✓ Penyuluhan yang Intensif	Dinas Pertanian

		Rendah	lebih baik	✓ Pelatihan budidaya tanaman	Dinas Perikanan dan Kelautan
				✓ Diversifikasi Pertanian (Sistem Pertanian Terpadu)	
3	Pegunungan	Akses Kelembagaan Terbatas (Pendidikan, Ekonomi, dan Keuangan)	Maksimalisasi Peran Kelembagaan Di desa (Pengembangan sarana dan prasarana kelembagaan)	✓ Pasar, ✓ Sekolah, ✓ Koperasi, ✓ Perbaikan jalan ✓ Beasiswa Pendidikan	Dinas PUPR DISDAGKO dan UMKM Bidang Kesra dan Dinas Pendidikan
		Akses Pengelolaan/pe manfaatan Lahan	Perlindungan Pengelolaan Lahan	✓ Redistribusi Lahan	Dinas Pertanahan
			Kepastian Penggunaan Lahan	✓ PTSL	BPN
		Masa Tunggu Panen Perkebunan	Diversifikasi Tanaman Jangka Pendek	✓ Bantuan Bibit ✓ Bantuan Langsung Tunai	Dinas Pertanian dan Perkebunan

		Yang Lama		dan PKH ✓ Penyuluhan	Dinas Sosial
			Pemberdayaan masyarakat melalui usaha produktif	✓ Pelatihan Pengolahan hasil Pertanian dan Manajemen Kewirausahaan	DISDAGKOP dan UMKM
4	Tambang	Keterbatasan prasarana dalam mengakses pengolahan lahan perkebunan	Pengembangan Sarana Jalan	✓ Pembuatan Jalan Tani	Dinas Pertanian Dinas PUPR
		Usia Petani Rata-rata 50 Tahun Keatas	Pengembangan Kualitas kehidupan dan penghidupan SDM	✓ Pemberian bantuan (BLT dan PKH ✓ sosialisasi Petani Milenial	Dinas Pertanian Dinas Sosial

Sumber: Data Primer Diolah Tahun 2022

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kemiskinan di Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin Kabupaten Luwu Timur menduduki peringkat 7 persentase penduduk miskin terendah di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Terdapat empat belas indikator lokal kemiskinan dari lima aspek yang terdiri dari tempat tinggal, pekerjaan, kepemilikan asset, ekonomi, pendapatan dan pendidikan.
3. Kemiskinan pada empat klaster wilayah disebabkan oleh kondisi alamiah dan ekonomi, kondisi struktural dan sosial, serta kondisi budaya
4. Karakteristik kemiskinan terdiri dari kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif.
 - kemiskinan absolut yakni kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.
 - kemiskinan relatif yakni penghitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.
5. Masalah kemiskinan meliputi kerentanan terhadap sumber penghidupan, tertutupnya akses kepada berbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar bahkan seluruh penghasilannya untuk konsumsi pangan dalam kualitas

dan kuantitas terbatas, tingginya rasio ketergantungan, serta adanya kemiskinan yang diwariskan secara terus menerus.

6. Manajemen pendataan kemiskinan dimulai dari penentuan penduduk miskin berdasarkan indikator lokal kemiskinan yang telah ditetapkan. Kemudian dilakukan verifikasi terhadap penduduk miskin mulai dari tingkat RT/RW, desa, dan kecamatan, selanjutnya dilakukan penetapan penduduk miskin.
7. Prioritas Program pengentasan kemiskinan diKabupaten Luwu Timur antara lain: Diversifikasi sumber kehidupan, pengembangan kualitas SDM, kepastian dalam pengelolaan lahan, dan bantuan secara langsung berupa alat-alat produksi.

5.2. Rekomendasi

1. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan memerlukan sinergitas dan kolaborasi antara instansi serta Perangkat daerah terkait.
2. Dalam mengidentifikasi sasaran dan pengembangan program pengentasan kemiskinan selain mengacu pada indikator BPS, juga perlu dikembangkan indikator kemiskinan lokal yang ada sehingga program yang dilaksanakan relevan dan mendapat dukungan penuh dari sasaran serta memiliki nilai kemanfaatan secara berkelanjutan

3. Untuk mengukur tingkat kemiskinan dengan menggunakan indikator lokal kemiskinan Kabupaten Luwu Timur, maka diperlukan pengukuran lebih lanjut dengan metode kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 28 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
- Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 16 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa, pasal 8 huruf g nomor 12 tentang Pendataan dan Analisis Kemiskinan Partisipatif.
- Badan Pusat Statistik (BPS), Republik Indonesia tahun 2022
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2022
- Creswell, J.W., 2010, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. University of Nebraska, Lincoln: SAGE Publication Ltd
- Gunawan, I. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*. Bumi Aksara. Jakarta, Edisi ke tiga
- Yin, R.K, 2015. *Studi Kasus, Desain dan Metode*, Rajawali Press, Jakarta. Edisi 14.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Kriteria Kemiskinan

I. Kriteria Kemiskinan

1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Tempat Tinggal (Rumah)	Rumah permanen (besar)	Rumah Semi Permanen (Beton/kayu)	Rumah kayu dengan atap rumbia
2.	Kendaraan	Memiliki Mobil	Memiliki Motor	Ada motor tapi cicilan
3.	Pekerjaan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Karyawanan , pegawai tetap, PNS, pengusaha/ kontraktor ✓ Nelayan/punya bagang 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Nelayan, petani (nelayan kecil) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Serabutan ✓ Tidak bekerja secara tetap
4.	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ S2 dan S3 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SD, SMP dan SMA 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ SD dan SMP
5.	Gaya Hidup	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki barang bermerek ✓ Memiliki emas ✓ Punya HP (iphone), TV, Laptop ✓ Perawatan Rutin 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Punya HP standar 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Punya HP Katto- katto
6.	Pola Makan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Makan lebih 3 x sehari ✓ Delivery order 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Makan 2x sehari 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak menentu

2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Tempat tinggal (Rumah)	Rumah bagus/rumah batu	Rumah kayu	Rumah pondok dengan atap daun sagu dan lantai papan
2.	Kepemilikan Lahan dan Asset	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki lahan kebun yang luas ✓ Memiliki RAP ✓ Memiliki speedboat (johnson) 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki kebun tapi tidak luas (0,5 Ha) ✓ Memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Memiliki kebun <1 Ha ✓ Perahu Dayung
3.	Hasil Perkebunan	Memiliki banyak tanaman merica	Memiliki tanaman merica dan sayuran	Memiliki tanaman merica (hanya sedikit)
4.	Pekerjaan	Memiliki pekerjaan tetap (pegawai) dan memiliki kebun	Pegawai biasa	Bukan Pegawai
5.	Sumbangan	Banyak sumbangan/punya usaha	Sumbangannya dalam skala sedang	Sekitar 60 thn ke atas Terima Sumbangannya

3) Desa Batuputih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Pendapatan	Rp.3.000.000 /bln atau Rp.100.000/hari	Rp.1.500.000 s/d Rp.2.000.000 /bln atau Rp.50.000/hari	Rp.500.000/bln
2.	Tempat tinggal	Punya rumah permanen	Rumah Kayu	Menumpang di rumah orang lain (belum punya rumah)
3.	Lahan	Punya lahan lebih dari 1 Ha	Punya lahan kurang dari 1 Ha	Tidak punya lahan
4.	Aset	Walet, kebun luas		
5.	Pekerjaan	Bertani/ Pengumpul hasil sawit	Bertani	Bertani (buruh tani), buruh bangunan dan pembuat gula
6.	Pendidikan keluarga	Anaknya bersekolah sampai jenjang PT	Pendidikannya umumnya SMA hanya sebagian kecil yang melanjutkan ke jenjang PT	Pendidikan tingkat SD
7.	Kendaraan	Memiliki mobil dan motor	Memiliki kendaraan sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak punya motor (jalan kaki untuk keluar kampung) ✓ Motor digunakan hanya untuk ke

				kebun
8.	Barang berharga	Sering menggunakan perhiasan yang banyak/berganti-ganti ke pesta	Punya perhiasan sederhana	Perhiasan yang digunakan sederhana bahkan tidak memiliki perhiasan

4) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Ciri-ciri	Kriteria		
		Kaya	Sedang	Miskin
1.	Kepemilikan asset	✓ Memiliki lahan pertanian lebih 1 Ha	✓ Memiliki lahan pertanian lebih dari 0,5 Ha	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tidak memiliki lahan garapan dan hanya menyewa lahan ✓ Lahan kurang dari 0,5 Ha
2.	Pekerjaan	Bertani dan berwiraswasta	Bertani	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Hanya buruh tani atau bekerja serabutan ✓ Bertani dari menyewa lahan
3.	Tempat tinggal (rumah)	Memiliki rumah permanen	Memiliki rumah semi permanen	Memiliki rumah kayu dan dinding berbahan bambu

Lampiran 2. Kalender Musim Kegiatan

1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

Kegiatan	Bulan											
	1	2										
PETANI												
1. Panen Merica												
- Pemeliharaan Merica												
- Pemupukan												
2. Panen Kakao												
- Pemupukan												
3. Panen Kelapa Sawit												
- Pemupukan												
NELAYAN												
1. Kegiatan menangkap Ikan (melaut)												
2. Cuaca Buruk (tidak melaut)												
3. Cuaca Pancaroba												
4. Pekerjaan selain nelayan (Bertani dan buruh)												
5. Perbaikan Alat Tangkap												

Ket:  ± Rp. 3.500.000

 Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000

 Rp. 2.000.000

2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

Kegiatan	Musim											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Panen Lada	■	■							■	■	■	■
2. Tanam Padi	■	■										
3. Panen Padi (Padi Ladang, Padi merah)				■	■							
4. Musim Hujan	■	■	■	■	■	■	■	■				
5. Pesta Panen Lada (D. Landangi, K. Tandang)							■	■				
6. Panen Jagung (2x panen/thn)												
7. Porang (Dsn. Bonepute)												
8. Nilam (Dsn. Bonepute)												
9. Madu Hutan				■	■	■	■	■				

3) Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

Kegiatan	Musim											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Petani Sawit												
- Panen Raya												
2. Petani Kakao												
- Panen Raya												
3. Cengkeh												
- Panen Raya												

Lampiran 3. Analisis Potensi, Masalah, dan Solusi

1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Nelayan	Laut, ikan, bakau, karamba pukat, tambak ikan, bagang bila, pelabuhan, dermaga	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Alat tangkap pukat masih sederhana dan masih kurang ✓ Adanya pencemaran laut oleh pertambangan (air keruh) ✓ BBM Langka dan mahal ✓ Hasil tangkapan kurang ✓ Lokasi penangkapan ikan semakin jauh ✓ Adanya nelayan dari luar daerah/kampung yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan alat tangkap ✓ Perusahaan membuat alat filter ✓ Subsidi BBM bagi nelayan ✓ Regulasi khusus nelayan ✓ Perbaikan terumbu karang ✓ Adanya Perdes tentang larangan penangkapan ikan
2.	Petani	Perkebunan (sawit, merica cengkeh, sayuran, buah)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harga pupuk mahal dan langka ✓ Adanya hama tanaman ✓ Kurangnya modal ✓ Penyuluh pertanian kurang aktif 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bantuan pupuk dan bibit ✓ Bantuan obat-obat pertanian ✓ Penyuluhan dan sosialisasi pertanian ✓ Bantuan modal pertanian.

2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Merica ✓ Sayuran (Jengkol, sawi, Kacang panjang, kecipir) ✓ Sawah ✓ Buah-buahan (rambutan) ✓ Cengkeh 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pupuk (harga pupuk mahal ✓ Merica mati karena serangan hama/penyakit ✓ Harga merica tidak stabil ✓ Hasil rendah (tidak berbuah) karena tidak dipupuk ✓ Musim tidak menentu (sawah tadah hujan) ✓ Sebagian besar hasil panen untuk kebutuhan keluarga ✓ Cengkeh tidak berbuah ✓ Hasil panen buah dan perkebunan rendah ✓ Penyuluh pertanian jarang datang ke masyarakat Desa Matano 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Subsidi harga pupuk (murah dan tersedia) ✓ Penyuluh pertanian
2.	Buruh Harian	Karyawan	Musiman/tidak menentu ada	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Perlu pekerjaan lain ✓ Butuh modal untuk bisnis RT (buka warung)
3.	Pedagang	Sembako (kios)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Modal ✓ Jaminan ke bank 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ KUR ✓ Lebih bervariasi
4.	Tukang Jahit	Permak pakaian	Kurang pelanggan	Perlu pelatihan (keterampilan)/ pekerjaan lain
5.	Usaha Madu	<ul style="list-style-type: none"> • Obat kesehatan 	Musiman (1 x setahun)	

Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani Kelapa Sawit	Tanaman sawit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pupuk subsidi langka ✓ Harga Obat-obatan mahal ✓ Pupuk non subsidi mahal ✓ Akses jalan sulit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembnagan usahatani kelapa sawit ✓ Mekanisme penyaluran pupuk ✓ Perbaikan jalan tani
2.	Petani Cengkeh	Tanaman Cengkeh	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pupuk cengkeh susah didapatkan ✓ Racun dan obat-obatan mahal ✓ Akses jalan sulit/kurang baik ✓ Belum masuk kelompok tani sehingga belum mendapatkan pupuk ✓ HPT cengkeh 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembnagan Usahatani Cengkeh ✓ Perbaikan jalan tani ✓ Akses untuk mendapatkan input ✓ Penumbuhan kesadaran petani ✓ Penyuluhan pertanian
3.	Petani Kakao	Tanaman Kakao	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Harga panen tidak stabil ✓ HPT Kakao ✓ Tanaman sudah tua 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengambnagan usahatani Kakao ✓ Peremajaan & pengendalian tanaman kakao ✓ Penguatan posisi tawar petani ✓ Penyuluhan pertanian
4.	Pengrajin gula aren	Gula Aren	Cairan gula dimasuki air sehingga gula tidak jadi	Gula Aren
5.	Pengusaha	Sarang Walet	Harga rendah	Sarang Walet

3) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Pekerjaan	Potensi	Masalah	Solusi
1.	Petani Padi	Pengembangan usahatani padi	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pupuk sulit diperoleh ✓ Penguasaan dan pengusahaan lahan semakin sedikit 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Mekanisme penyaluran pupuk ✓ Diversifikasi usaha
		Budidaya ikan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sebagian besar untuk konsumsi ✓ Belum intensif dibudidayakan untuk usaha/bisnis 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan usaha budidaya ikan
	Peternakan	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Beternak hanya untuk tabungan ✓ Usaha belum intensif untuk komersil 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pengembangan usaha peternakan 	
2.	Buruh tani/buruh bangunan	Tanaman padi dan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Buruh tani musiman karena tidak setiap saat ada ✓ Sulit memperoleh pekerjaan harian selain dari usahatani padi ✓ Buruh bangunan sifatnya temporer karena tidak ada setiap saat 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberdayaan masyarakat

Lampiran 4. Alokasi Pendapatan Perbulan

1) Desa Harapan Kecamatan Malili (Klaster Pesisir)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Nelayan	1. Konsumsi
		2. Tidak ada tabungan (<i>dissaving</i>)
2.	Petani	1. Konsumsi
		2. Tidak ada tabungan (<i>dissaving</i>)
3.	Karyawan	1. Konsumsi
		2. Tabungan (<i>dissaving</i>)

2) Desa Matano Kecamatan Nuha (Klaster Pertambangan)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Petani	1. Biaya anak sekolah
		2. Keperluan dan kebutuhan sehari-hari
		3. Arisan kelompok dasawisma
		4. Tabungan
		5. Sosial

3) Desa Batu Putih Kecamatan Burau (Klaster Pegunungan)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Bertani kelapa sawit	1. Biaya anak sekolah
		2. Uang jajan
		3. Belanja bulanan
		4. Biaya untuk lahan/kebun
		5. Tidak ada tabungan
2.	Bertani cengkeh	1. Biaya sehari-hari
		2. Biaya untuk kebun/lahan
		3. Tidak ada tabungan
3.	Bertani kakao/coklat	
4.	Gula Aren	

4) Desa Pattengko Kecamatan Tomoni Timur (Klaster Pertanian)

No.	Pekerjaan	Alokasi
1.	Bertani padi	1. Biaya anak sekolah
		2. Kebutuhan sehari-hari
		3. Kebutuhan/keperluan sosial
		4. Biaya untuk usahatani
		5. Ada tabungan bagi usahatani lebih dari 0.5 Ha dan dibawah 0,5 Ha hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2.	Buruh tani dan serabutan	1. Kebutuhan sehari-hari

DOKUMENTASI KEGIATAN







